



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GUSTI BAGUS BUDI DHARMA
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
3. NHK : 957753

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.600.000.000
1. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah Seluas 2.345 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
4. Tanah Seluas 469 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	446.000.000
1. MOTOR, NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, XPANDER MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.272.000.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 5.408.000.000

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 5.408.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.